

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP
(STUDI PADA KOPERASI KARYAWAN TIRTA DHARMA
KHATULISTIWA PDAM KOTA PONTIANAK)**

ARTIKEL PENELITIAN



**OLEH:
DY.RAHMAWATI
NIM. F1023151042**

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP
(STUDI PADA KOPERASI KARYAWAN TIRTA DHARMA KHATILISTIWA PDAM
KOTA PONTIANAK)**

ARTIKEL PENELITIAN

**DY.RAHMAWATI
NIM F1032151042**

Disetujui,

Pembimbing I


**Drs. Bambang Genjik S, M.Si.
NIP. 19807141984031004**

Pembimbing II


**Dr. Husni Syahrudin, M.Si.
NIP. 1964012019990021001**

Mengetahui,

Dekan FKIP



**Dr. H. Martono, M.Pd
NIP. 196803161994031014**

Ketua Jurusan PIIS



**Dr. Hj. Sulistyarini, M.Si
NIP. 196511171990032001**

ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP (STUDI PADA KOPRASI KARYAWAN TIRTA DHARMA PDAM KOTA PONTIANAK)

Dy.Rahmawati, Bambang Genjik, Husni Syahrudin
Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak
Email: *dayangrahmawati19@gmail.com*

Abstract

This thesis is titled "Analysis the Implementation of Financial Accounting Standards of Entities without Public Responsibility (IFRSs) (Study of the PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Employee Cooperative of Pontianak)". The method used is descriptive method. Data collection techniques used is direct communication techniques and documentary study techniques. The data collection tool used interview guidelines and data contained in the archive owned by the PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Employee Cooperative Pontianak. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of this study showed that 1) The cooperative management in applying their financial statements does not refer to the Statement of Financial Accounting Standards No. 27 Cooperative Accounting because it only presents a Balance Sheet and Calculation of Operating Results (PHU), which should consist of a balance sheet, calculation of operating results (PHU), cash flow statements, member economic promotion reports, and notes to the financial statements. 2) In the application of the calculation of results of operations there is also an error in entering the name of the goods account, there are several accounts of goods that should help reduce income in the calculation of results of operations but not recorded cooperatives in the burden of cooperatives and in the calculation of results of operations also there is no separation of member income and non-members and operating expenses and cooperative expenses. 3) In the application of cooperative financial statements there are still errors in writing the name of the goods account and include it in the preparation of the report on writing also does not match the order in the financial accounting standards.

Key words: Analysis the Implementation of Financial Accounting Standards of Entities without Public Responsibility (IFRSs), Cooperative

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan kata lain Koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dimana di dalam koperasi berlandaskan azas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenis koperasi antara lain koperasi serba usaha, koperasi karyawan, koperasi wanita, dan lain sebagainya. Pada awal pertumbuhan koperasi di Indonesia sendiri dimulai pada

tahun 1896 dimana pendirian koperasi dirintis oleh Patih R. Aria wina Atmaja. Keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Koperasi Indonesia memiliki pengertian hampir sama dengan pengertian koperasi pada umumnya, yaitu sebuah organisasi usaha yang dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi

dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Agar tujuan nasional dapat tercapai dan koperasi dapat bersaing dengan badan usaha lainnya, maka koperasi perlu juga dikembangkan dalam bidang sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, angkutan, dan lain-lain. Usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan agar peranan koperasi meningkat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin besar, dan laba yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut makin dinikmati dan bermfaat bagi anggotanya. Saat ini koperasi dituntut untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya masyarakat luas pada umumnya. Salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasinya.

Koperasi wajib memberikan informasi pada setiap anggotanya mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan SHU yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya. Proses dalam penyusunan laporan keuangan, profesi akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, dan ketidak tepatan. Untuk meminimumkan bahaya ini, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Di Indonesia prinsip akuntansi ini, disusun dalam standar akuntansi keuangan (SAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus

di pedomani oleh setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut SAK ETAP yang diputuskan berdasarkan peraturan menteri yang baru Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, koperasi yang wajib menggunakan SAK ETAP adalah koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan merupakan koperasi sektor riil. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) sebagai solusi bagi perusahaan menengah dan kecil yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. Perusahaan kecil dan menengah dapat memilih untuk menggunakan standar akuntansi yang akan mereka gunakan selama memenuhi syarat sebagai entitas yang diperbolehkan menggunakan SAKETAP dan dijalankan secara konsisten. Selain perusahaan kecil dan menengah, ada beberapa perusahaan lain yang menggunakan SAK-ETAP sebagai standar akuntansinya berdasarkan peraturan pemerintah bersama IAI. Salah satu entitas tersebut ialah koperasi. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : 1. Neraca; 2. Perhitungan Hasil Usaha; 3. Catatan Atas Laporan Keuangan; Kemudian laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu : 4. Laporan Perubahan Ekuitas (modal); 5. Laporan Arus Kas. Meskipun demikian tidak semua koperasi mengetahui adanya aturan tertulis mengenai pedoman penyusunan keuangan yang

tertuang dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tahun 1998 tentang akuntansi perkoperasian. Dalam hal ini peneliti akan dilakukan pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak.

METODE PENELITIAN

metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Menurut Hadari Nawawi (2012:67), "metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian. Bentuk Penelitian Menurut Hadari Nawawi (2012: 64), dalam metode deskriptif ada tiga bentuk penelitian, yaitu : a.Survey (Survey Studies) b.Studi Hubungan (Interrelationship Studies) c.Studi Perkembangan (Developmental Studies)

Adapun bentuk penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah survey (Survey Studies), yang bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak). Sumber Data dan Data 1) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua dan Bendahara Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak yang melaksanakan pembuatan laporan keuangan koperasi.

2) Cara Pengambilan Data a. Data tentang Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak).yang melaksanakan pembuatan laporan keuangan koperasi. b.Data tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan diambil dengan cara observasi. Adapun alat Pengolahan Data Menurut Sugiyono (2018:401) "dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak digunakan bersamaan dengan pengumpulan data". Sedangkan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:401) "jenis analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses data Reduction, data display, dan verification". a. Reduksi Data (data reduction)

a).Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada penelitian yang dilakukan di Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak. data lapangan dituangkan dalam uraian laporan secara terperinci dan lengkap. b).Penyajian data (display data) Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu data penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak). c.Penarikan kesimpulan dan verifikasi Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan mengenai Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak.. Peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari data yang di dapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan diuraikan berdasarkan pada telaah pustaka yang telah disajikan, dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan analisa dan penilaian terhadap Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak).

Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bendahara Koperasi Ibu Rikha S S R, S.E.: 1. Apakah Ibu mengetahui keberadaan SAK dan SOP laporan keuangan? Jawaban: Sebagai bendahara

koperasi, saya harus mengetahui SAK dan SOP didalam membuat laporan keuangan koperasi 2. Apakah Ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan tentang SAK atau SOP yang diselenggarakan oleh kantor UKM? Jawaban: Secara jujur saya tidak mengikuti pelatihan tentang SAK atau SOP, tetapi saya membuat laporan keuangan berdasarkan rujukan, dalam hal ini PSAK 27 Tahun 2009. Bukankah sekarang ini bukan PSAK 27 tahun 2009 lagi yang digunakan melainkan SAK ETAP ? Jawab: iya memang betul apa yang adik katakana, tapi PSAK dan SAK ETAP itu mereka masih dalam satu rumpun hanya saja namanya yang berbeda yang sekarang diganti menjadi SAK ETAP 3. Apakah SAK atau SOP dapat dijadikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan koperasi? Jawaban : Iya SOP dan SAK saya jadikan pedoman dalam tugas saya menyusun laporan. Pedoman yang bagaimana ? Jawab: pedoman yang memang mengacu atau menjurus dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuanganitu sendiri 4. Standar atau Pedoman apakah yang Ibu gunakan dalam menyusun keuangan Koperasi? Jawaban : Didalam menyusun laporan keuangan koperasi, yang saya jadikan pedoman yaitu PSAK 27 Tahun 2009 atau 1999 5. Bagaimana bentuk laporan keuangan Koperasi yang Ibu buat? Jawaban: Bentuk laporan keuangan yang saya buat menyesuaikan dengan pedoman. 6. Kendala apa saja yang ibu hadapi ketika menyusun laporan keuangan koperasi? Jawaban: Kendala yang biasa saya hadapi atau saya temui itu hanya masalah waktu pembuatan saja, yang terkadang tidak sesuai jadwal. 7. Siapakah yang menyajikan dan menyusun laporan keuangan koperasi Karyawan Thirta Dharma khatulistiwa PDAM Kota Pontianak? Jawaban: Dalam pembuatan laporan keuangan di koperasi Karyawan Thirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak yang menyusun laporan keuangan menjadi tugas bendahara dan ketua koperasi. 8. Apakah ibu mempunyai latar belakang pendidikan atau mempunyai keahlian dibidang akuntansi koperasi? Jawaban: Latar belakang pendidikan saya lulus Sarjana Ekonomi 9. Apakah laporan keuangan yang ibu buat menjadi sumber

informasi bagi ketua koperasi dalam mengambil kebijakan dan keputusan?

Jawaban: Tentu laporan keuangan yang saya buat menjadi sumber informasi bagi Ketua Koperasi didalam mengambil keputusan. 10. Apakah saat mempertanggungjawabkan laporan keuangan ada pihak pemeriksa dan pengaudit laporan keuangan tersebut? Jawaban: Tidak ada Tim audit, tetapi disaat mempertanggungjawabkan laporan keuangan dihadiri seluruh pengurus maupun pengawas koperasi.

Pembahasan Neraca

Dalam SAK ETAP laporan neraca menerapkan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dimana pos-pos tersebut minimal mencakup kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Berdasarkan SAK ETAP pos-pos tersebut sudah termuat didalam laporn Neraca dan sudah memenuhi standar akuntansi keuangan entitas tanpa kuntabilitas public. Namun urutan dan format pos tidak ditentukan oleh SAK ETAP. Tetapi tidak mempengaruhi komponen utama yang ada dalam SAK ETAP yang berupa Neraca, Laporan Arus Kas dan laporan hasil usaha.

Dalam neraca Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak tidak terdapat pos properti investasi, aset tidak berwujud, aset dan kewajiban pajak, dan kewajiban diestimasi. Yang seharusnya ada atau di cantumkan karena pos-pos tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan yang seuaidengan SAK ETAP. Tetapi Tidak adanya pos properti investasi, dikarenakan Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak tidak melakukan sewa gedung untuk untuk unit-unit yang ada pada koperasi, melainkan hanya menjalankan usahanya yang telah disediakan , dan tidak memiliki aset tidak berwujud. Pos aset dan kewajiban pajak tidak juga tersaji pada neraca yang menunjukkan bahwa Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak belum

melakukan pembayaran pajak. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti sehingga memerlukan estimasi dan Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak tidak memiliki kewajiban diestimasi tersebut. Di karenakan tadik waktu dan jumlahnya belum pasti.

Penyajian neraca terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu: 1. Klasifikasi aset lancar dan aset tetap.

Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar apabila: a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan; c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau d. Berupa .kas .atau .setara .kas, .kecuali .jika .dibatasi .penggunaannya .dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Neraca Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak dalam penerapan pos aset lancar, tidak sesuai dengan klasifikasi SAK ETAP karena ada akun piutang khusus yang tersaji pada pos aset lancar dan seharusnya akun tersebut disajikan pada pos aktiva lain-lain dan untuk menghapus akun piutang khusus tersebut harus dibentuk akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang seharusnya akun tersebut disajikan untuk menghapus piutang tak tertagih. Sedangkan adanya penyajian nilai gedung dalam aset lainnya sebagai aset tetap tidak sesuai dengan SAK ETAP karena gedung yang disajikan dalam neraca tersebut bukan hak milik koperasi.

2. Klasifikasi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek apabila: a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan; c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau

d. Entitas .tidak .memiliki .hak .tanpa .syarat .untuk .menunda .penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Koperasi Karyawan thirta Dharma Khatulistiwa PDAM kota Pontianak telah menerapkan pos kewajiban lancar sesuai dengan klasifikasikan kewajiban lancar yang diatur dalam SAK ETAP dimana kewajiban lancar tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Dan begitu juga dengan modal sendiri yang sudah dimuatkan dalam neraca yang diatur dalam SAK ETAP di mana modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan dan SHU yang sudah termuat dan sesuai dengan SAK ETAP.

Laporan Usaha Koprasi

Dalam SAK ETAP paragraf 5.3, laporan usaha koperasi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (1) Pendapatan,
- (2) Beban keuangan,
- (3) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas,
- (4) Beban pajak, dan
- (5) Laba atau rugi neto.

Dalam penerapan laporan usaha Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak tidak terdapat akun atau pos bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas dan juga beban pajak, yang dapat dilihat pada penerapan laporan laba rugi. Penerapan pos atau judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi, telah sesuai dengan SAK ETAP yang bertujuan untuk memahami kinerja keuangan dan juga entitas tidak menerapkan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, dalam laporan laba rugi.

Akun beban pajak juga tidak terdapat dalam laporan usaha koperasi yang menunjukkan bahwa Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak belum memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana yang telah diwajibkan dalam SAK ETAP. SAK ETAP juga mewajibkan format laporan keuangan laba rugi entitas dengan

menggunakan analisa sifat beban dan analisa fungsi beban.

Di dalam kedua metode analisa tersebut, tidak diperkenankan untuk membandingkan pendapatan dengan piutang usaha dan selisih persediaan akhir bulan lalu dengan bulan berjalan. Dalam penyajian laporan usaha koperasi, Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak menggunakan analisa sifat beban. Analisa sifat beban dipilih karena tidak memerlukan pengungkapan tambahan seperti pada analisa fungsi beban yang dapat dilihat pada laporan usaha koperasi.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menerapkan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas menerapkan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, dan Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak telah menerapkan sesuai dengan pengklasifikasian tersebut.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e. Pembayaran.. kas.. atau ..restitusi.. pajak.. penghasilan.. kecuali.. jika.. dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Dalam penyajian laporan arus kas Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak, pada pos arus kas aktifitas operasi telah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dimana akun-akun yang terdapat pada pos arus kas aktifitas operasi telah sesuai dengan kriteria SAK ETAP.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: (a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; (b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; (c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); (d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk

diperdagangkan); (e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; (f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Dalam penyajian laporan arus kas Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak, pada pos arus kas aktifitas investasi telah sesuai dengan SAK ETAP, yaitu akun-akun yang tersaji dalam pos arus kas aktifitas investasi merupakan akun-akun yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pihak pengurus koperasi dalam menyajikan laporan keuangannya tidak mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian karena hanya menyajikan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (PHU), yang seharusnya terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha (PHU), laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Pada penerapan perhitungan hasil usaha juga terdapat kesalahan dalam memasukan nama akun barang, ada beberapa akun barang yang seharusnya ikut mengurangi pendapatan dalam perhitungan hasil usaha akan tetapi tidak dicatat koperasi dalam beban perkoperasian dan dalam perhitungan hasil usaha juga tidak ada pemisahan pendapatan anggota dan non anggota serta beban usaha dan beban perkoperasian. 3. Dalam penerapan laporan keuangan koperasi masih terdapat kekeliruan dalam penulisan nama akun barang serta memasukannya kedalam penyusunan laporan pada penulisan juga tidak sesuai dengan tata urutan dalam standar akuntansi keuangan.

Saran

1. Untuk pihak manajemen koperasi sebaiknya dalam melakukan proses penyajian laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian (PSAK No. 27) Akuntansi Perkoperasian karena dengan adanya laporan keuangan yang

lengkap dan memadai maka dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menyusun proses perencanaan dan pengambilan keputusan pada periode berikutnya. 2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, koperasi merupakan sokoguru dan tulang punggung perekonomian maka sudah seharusnya koperasi di kelola dengan baik, yaitu dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan perundang-undangan termasuk dalam kewajiban sebagai obyek pajak. 3. Dengan perkembangan koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak selama ini sangat disayangkan sekali apabila Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa PDAM Kota Pontianak tidak didukung dengan penyusunan laporan keuangan yang baik maka dari itu bagi pihak manajemen koperasi sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan pada kegiatan administrasi koperasi (pembukuan).

DAFTAR RUJUKAN

Ardi Kusumah, Arief. (2012). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*. Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi (Implementation of the Government Accounting Standards The influence of on the quality of the Financial Statements (Survey on SKPD / OPD Tasikmalaya City Government). Faculty of Economics, University of Siliwangi, Retrieved from Journal.unsil.ac.id/download.php?id=283.

Auliyah, Iim Ma'rifatul. (2012). *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UMKM Kampung Batik Di Sidoarjo (Implementation of Accounting Based on SAK ETAP At SMEs in Kampung Batik Sidoarjo)*

- (Master's thesis, Perbanas Economics School Surabaya).
- Cheng, Jierong. (2015). *Small and Medium Sized Entities Management's Perspective on Principles-Based Accounting Standars on Lease Accounting*. Scientific Research Publishing 6, 71-76.
- Departemen Koperasi Republik Indonesia. (1990). *Peningkatan Partisipasi Anggota Melalui Pendidikan Anggota*. Jakarta.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tangjungpura. (2017). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Pontianak.
- Financial Accounting Standards Entities without Public Accountability (SAK-ETAP)* Mei 2009
- Hadari Nawawi. (2009). *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:UGM Press
- John Ropke.(2000). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Manajemen)*, Terjemahan Sri Djatnika S. Arifin, Jakarta, Salemba Empat.
- Kieso, Weygandt, Warfield. (2002). *Intermediate Accounting, the tenth edition*, Jakarta: Erlangga Publisher.
- Ninik Widiyanti.(1991). *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Rusidi.(1992). *Pokok-pokok Pikiran Tentang Pemba-ngunan Koperasi*, IKOPIN, Bandung.
- Seifert, Deborah L dan Deborah L. Lindberg. (2010). *Key Provision of IFRS for Small and Medium-sized Entities*. CPA Journal, Vol. 80 Issue 5, p34.
- Sudjana. (2002). *Mengajar Dengan Sukses*. Jakarta:PT.Raya Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Bandung:Alfabeta
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.
- Vasek, Libor. (2011). *IFRS for SMES—A New Challenge for Worldwide Financial Reporting*. *International Journal of Management Cases*, 13, 115-120.
<http://dx.doi.org/10.5848/APBJ.2011.00118>.
- Winarno Surakhmad.(2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito